

**PERAN KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA DALAM  
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DALAKA  
DI KEC. SINDUE KAB. DONGGALA**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarjana  
pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin,  
Adab, dan dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

**Oleh :**

**AFID**  
**NIM. 16.4.14.0001**

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan Penuh Kesadaran, penyusun skripsi yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya, batal demi hukum.

Palu,                    2020  
Penyusun,

AFID  
NIM.16.4.14.0001

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “ **Peran Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa Dalaka di Kec. Sindue Kab. Donggala**”. Oleh mahasiswa atas nama Afid, Nim: 16.4.14.0001, Mahasiswa Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN PALU, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi yang bersangkutan maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat Ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan di sidang Munaqasyah.

Palu,

M  
H

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Nurdin S.Pd., M.Com., Ph.D**  
**NIP.19690301 199903 1 005**

**Dr. Muhammad Alim Ihsan M.Pd.**  
**NIP.19690605 200501 1 011**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Afid NIM. 16.4.14.0001 dengan judul “Peran Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembanguna Desa Dalaka di Kec. Sindue Kab. Donggala, yang telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 28 Agustus 2020 yang bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1442 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah dengan beberapa perbaikan.

## DEWAN PENGUJI

| Jabatan           | Nama                          | Tanda Tangan |
|-------------------|-------------------------------|--------------|
| Ketua Tim Penguji | Dr. Muhammad Alim Ihsan, M.Pd |              |
| Munaqasyah I      | Dr. Rusdin, S.Ag., M. Fil.I   |              |
| Munaqasyah II     | Drs. Ibrahim Latepo, M. Sos.I |              |
| Pembimbing I      | Nurdin S.Pd., M.Com., Ph.D    |              |
| Pembimbing II     | Dr. Muhammad Alim Ihsan, M.Pd |              |

### Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan  
Dakwah

Ketua Jurusan Pengembangan  
Masyarakat Islam

**Dr. H Lukman S.Tahir, M.Ag**  
NIP. 19650901 199603 1 0001

**Dr. Muhammad Alim Ihsan M.Pd**  
NIP. 19690605 200501 1 011

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirohiim**

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menuli skripsi yang berjudul “Peran Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa Dalaka di Kec. Sindue Kab. Donggala”.

Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing umat dari masa jahiliyyah menuju masa yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan bimbingan dan kritikan yang bersifat membangun.

Dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar – sebesar kepada :

1. Kedua orang tua tercinta dengan susah payah mengasuh dan membesarkan penulis, sehingga penulis bisa melangkah sejauh ini. Tidak lupa seluruh keluarga yang senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan studi di bangku perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd.selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah mengizinkan penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi yang bapak pimpin.
3. Bapak Dr.H.Lukman S.Tahir, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin,Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah mengarahkan penulis dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

4. Bapak Dr.Rusdin, S.Ag., M.Fil.I selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.
5. Bapak Mokh. Ulil Hidayat, S.Ag., M.Fil.I selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
6. Bapak Dr. Syamsuri, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan kerjasama.
7. Bapak Dr. Muhammad Alim Ihsan M.Pd selaku ketua jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
8. Ibu Andi Muthia Sari Handayani, S.Psi. M.Psi selaku Dosen Penasehat Akademik.
9. Bapak Nurdin S.Pd., S.S., M.Com., P.hD selaku dosen pembimbing satu.
10. Bapak Dr. Muhammad Alim Ihsan, M.pd selaku dosen pembimbing dua.
11. Para Dosen Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang berkat ilmu yang diajarkan telah membuka wawasan berpikir dan cakrawala pengetahuan, sehingga menjadikan landasan yang kokoh bagi penulis dalam mengembangkan keilmuan pada masa yang akan datang.
12. Teman–teman yang selalu memotivasi penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi penulis.

Palu, \_\_\_\_\_ M.  
H

Afid  
Nim 16.4.143.0001

## DAFTAR ISI

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMBUNG                      | i    |
| HALAMAN JUDUL                        | ii   |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  | iii  |
| HALAMAN PERSETUJUAN                  | iv   |
| HALAMAN PENGESAHAN                   | v    |
| KATA PENGANTAR                       | vi   |
| DAFTAR ISI                           | viii |
| DAFTAR TABEL                         | x    |
| DAFTAR LAMPIRAN                      | xi   |
| ABSTRAK                              | xii  |
| <br>                                 |      |
| BAB I PENDAHULUAN                    | 1    |
| A. Latar Belakang                    | 1    |
| B. Rumusan Masalah                   | 5    |
| C. Tujuan Penelitian                 | 5    |
| D. Manfaat Penelitian                | 6    |
| <br>                                 |      |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA              | 7    |
| A. Konsep Kinerja                    | 7    |
| 1. Pengertian Kinerja                | 7    |
| 2. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja  | 9    |
| 3. Penilaian Kinerja                 | 12   |
| 4. Tujuan Penilaian Kinerja          | 15   |
| 5. Indikator Kinerja                 | 17   |
| B. Konsep Pendamping Desa            | 18   |
| 1. Peraturan Tentang Pendamping Desa | 18   |
| 2. Tugas Pendamping Desa             | 20   |
| C. Konsep Pembangunan Desa           | 23   |
| 1. Pengertian Pembangunan Desa       | 23   |
| 2. Tujuan Pembangunan Desa           | 27   |
| 3. Strategi Pembangunan Desa         | 28   |
| D. Penelitian Terdahulu              | 30   |
| <br>                                 |      |
| BAB III METODE PENELITIAN            | 31   |
| A. Jenis Penelitian                  | 31   |
| B. Lokasi Penelitian                 | 33   |
| C. Kehadiran Peneliti                | 33   |

|   |    |
|---|----|
| D. Data dan Sumber Data .....                                   | 34 |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                                | 37 |
| F. Teknik Analisis Data .....                                   | 39 |
| G. Pengecekan Keabsahan Data .....                              | 40 |
| H. Tahap-Tahap Penelitian .....                                 | 41 |
| <br>  |    |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....                               | 43 |
| A. Sejarah Desa Dalaka .....                                    | 43 |
| B. Kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa Dalaka .....           | 46 |
| C. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pendamping Lokal Desa ..... | 51 |
| <br>  |    |
| BAB V PENUTUP.....  | 56 |
| A. Kesimpulan.....  | 57 |
| B. Saran .....  | 57 |
| <br>  |    |
| DAFTAR PUSTAKA  |    |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN   |    |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP  |    |



## **DAFTAR TABEL**

|   |    |
|---|----|
| 1.Obesertasi Desa Dalaka.....                                   | 45 |
| 2.Profil Pendamping Lokal Desa di Desa Dalaka Kec. Sindue.....  | 47 |
| 3.Program Kerja yang terselesaikan dan belum terselesaikan..... | 50 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Informan
2. Pengajuan Judul
3. Penunjukkan Dosen Pembimbing
4. Undangan Seminar Proposal
5. Berita Acara Proposal Skripsi
6. Surat Izin Penelitian
7. Dokumentasi
8. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Nama Penulis : Afid**  
**NIM : 16. 4.14.0001**  
**Judul Skripsi : Peran Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Dalaka Di Kec. Sindue Kab. Donggala**

---

Skripsi ini berkenaan dengan Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Dalaka di Kec. Sindue Kab. Donggala dan masalah yang peneliti dapatkan ialah bagaimana kinerja dari pendamping desa yang berada di desa dalaka dan apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja dari pendamping lokal desa dalam melakukan pendampingan program yang diberikan oleh desa.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, tehnik pengumpulan data melalui observasi wawancara, dan dokumentasi, tehnik analisis data yang digunakan adalah reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja dari pendamping lokal desa belum efektif sama sekali dalam melakukan atau mendampingi program yang diberikan oleh desa, yang mana masih ada beberapa program yang belum bisa terselesaikan oleh Pendamping Lokal Desa di karenakan adanya faktor yang mempengaruhi Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan atau mendampingi program yang diberikan oleh desa. Faktor yang didapatkan didalam lapang ialah kurangnya pemahan dari pendamping lokal desa tersebut dan lokasi yang didapatkan oleh pendamping lokal tersebut.

Dari kesimpulan yang diperoleh dan saran ialah yang dimana agar aparat desa dan pendamping lokal desa bisa berkerjasama dalam melaksanakan dan mendampingi program desa agar bisa mencapai pembangunan desa yang maksimal dan yang di harapkan. Kemudian bisa lebih bersinerji dalam melaksanakan tugas-tugas dari yang diberikan oleh desa.

**Kata kunci : Kinerja, Pendampingan, Pembangunan**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).<sup>1</sup> Koentjaraningrat sebagaimana yang dikutip oleh Adon Nasrulloh memberikan pengertian mengenai desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yakni komunitas besar (seperti kota, Negara bagian, dan Negara) dan komunitas kecil (seperti band, desa, rukun tetangga). Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat. Ia tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus bergantung pada sector pertanian. Dengan kata lain, masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak hanya disektor pertanian saja.<sup>2</sup>

Dari Sudut pandang sejarah Politik hukum tentang Desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya ada tiga undang-undang yang mengatur secara khusus tentang desa, yaitu UU No. 19 Tahun 1965 Desapraja, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dan terakhir UU No. 6 Tahun 2014

---

<sup>1</sup> Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm.5

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6

tentang Desa. Selebihnya pengaturan tentang pemerintahan daerah, seperti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>3</sup>

Dalam pengelompokannya, kewenangan yang dimiliki desa meliputi : kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan berdasarkan adat istiadat desa. Dalam pasal 19 dan 103 UU Desa disebutkan, desa dan Desa adat mempunyai empat kewenangan, meliputi :<sup>4</sup>

Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.

Kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>3</sup> Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018, hlm. 1

<sup>4</sup> Silahuddin, M, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, hlm. 12-13

Secara Umum, UU meletakkan Desa dalam posisi selayaknya, yakni sebagai kesatuan masyarakat hukum khas Indonesia yang keberadaannya mendahului Negara modern Indonesia. Selain itu juga pengakuan atas kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang memberikan keleluasaan bagi Desa untuk menyelenggarakan Pembangunan Desa secara mandiri.<sup>5</sup>

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.<sup>6</sup>

Pembangunan desa sebagai sistem yang dikontinuikasikan UU Desa, menempatkan masyarakat pada posisi strategis, yaitu sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, masyarakat memiliki peran strategis dalam tata kelola desa termasuk didalamnya penyelenggaraan pembangunan desa. Isu penting dalam konteks ini adalah peningkatan keberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya desak yang efektif untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik dan penyeleggaraan pembangunan yang sesuai dan memenuhi aspirasi masyarakat.

---

<sup>5</sup> Yustika, Erani Ahmad, *Pengembangan Desa*, Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, hlm. 2

<sup>6</sup> Kessa, Wahyudin, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, hlm 18.

Dalam kerangka itulah, pemerintah menetapkan kebijakan dan pendampingan sebagaimana tercantum pada pasal 2 peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015, yang bertujuan:<sup>7</sup>

- a. Meningkatkan Kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembanguna desa.
- b. Meningkatkan Prakarsa, Kesadaran dan partisipatif masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor.
- d. Meningkatkan asset lokal desa.

Dengan hadirnya kebijakan penempatan pendamping desa sebagai amanat Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa maka hadirilah peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi No. 3 tahun 2015 tentang pendamping desa yang membahas mengenai pendamping desa termasuk didalamnya mengenai pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus utama pendamping desa.<sup>8</sup>

Oleh karena itu para Pendamping Desa harus mampu memahami apa yang menjadi tujuan dari pendampingan mereka dan harus memahami apa yang menjadi amanat dalam Undang-Undang desa agar fungsi pendampingan dapat berjalan secara maksimal dan memenuhi target yang diharapkan pemerintah serta masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, Penulis merasa tertarik untuk

---

<sup>7</sup> Modul pelatihan praturgas pendamping lokal desa implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2016,hlm. 3

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa.

mengadakan penelitian dengan judul “Peran Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa Dalaka di Kec. Sindue Kab. Donggala”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan judul skripsi “ Peran Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa Dalaka di Kec. Sindue, Kab. Donggala”.

Dengan demikian dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Pendamping Lokal dalam Peningkatan Pembangunan Desa Dalaka di Kec. Sindue Kab. Donggala?
2. Apa faktor-faktor penghambat pendamping Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam peningkatan Pembangunan Desa Dalaka di Kec. Sindue Kab. Donggala.
2. Untuk mengetahui apa-apa saja faktor yang menghambat Pendamping Lokal Desa dalam mendampingi Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala.



#### ***D. Manfaat Penelitian***

Berikut beberapa manfaat yang dapat diberikan oleh peneliti melalui penelitian ini :

1. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Donggala dalam memilih Pendamping Desa dan melihat apa-apa saja faktor kendala pendamping Desa dalam menangani atau mendampingi Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini bisa menjadi kontribusi dalam pengembangan konsep pembangunan masyarakat dalam segala aspek.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Konsep Kinerja**

**1. Pengertian Kinerja**

Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya.<sup>9</sup>

Islam selalu menyuruh orang untuk beramal dan berusaha karena tujuan hidup dalam pandangan islam ialah bukanlah amal yang sempurna dan usaha yang rajin dengan menggunakan bakat dan kecakapan yang terpendam dalam jiwa seseorang. Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah/9: 105, disebutkan :



---

<sup>9</sup>Dr.H.Bahrul, Kirom, *Mengukur Kinerja Pelayanan dan kepuasan konsumen*, Bandung: Pustaka reka cipta, 2015, hlm 3

*“ Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan*

*dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”(QS.At-Taubah[9]:105)*

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya, agar beliau mengatakan kepada kaum Muslimin yang bertobat dan membersihkan diri dari dosa-dosa dengan cara bersedekah dan mengeluarkan zakat dan melakukan amal saleh sebanyak mungkin. Disamping itu Allah juga memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menyampaikan kepada umatnya, bahwa apabila mereka telah melakukan amal-amal saleh tersebut maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin lainnya akan melihat dan menilai amal-amal tersebut.<sup>10</sup>

Sedangkan Menurut Suyadi, *Perfomance* atau kinerja adalah hasil kerja yang kita dapat atau yang telah kita capai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.<sup>11</sup>

Sedangkan Anwar Prabu, kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang di capai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.<sup>12</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan konfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994

<sup>11</sup> Prawirosuntono, Suryadi, *Kebijakan Kinerja Karyawan*, Yogyakarta: BPFE, 2008

<sup>12</sup> Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2009

organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja**

Setiap perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang mampu bekerja lebih baik dan lebih cepat, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kinerja yang tinggi. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.<sup>13</sup>

Evaluasi yang dilakukan dengan adil diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Karyawan yang tidak berprestasi baik akan memperoleh umpan balik dan diharapkan akan meningkatkan prestasinya. Namun, kadang cara evaluasi tidak memperbaiki kondisi. Karyawan yang dapat merasa tersinggung atau putus asa. Hal ini akan semakin memperburuk prestasinya. Dengan demikian, Manjer harus hati-hati dalam menjelaskan evaluasinya terhadap karyawan. Evaluasi diharapkan menjadi proses yang diharapkan bagian integral dari proses interaksi antara manajer dengan karyawan dan adapun hambatan atau faktor yang didapatkan dalam pekerjaan ialah :<sup>14</sup>

### **1. Perubahan Standar**

Standar yang tidak konsisten dan berubah-ubah akan mempengaruhi pengukuran prestasi karyawan. Sebagai contoh, manajer mungking cenderung

---

<sup>13</sup>Mangkunegara, Anwar Prabu, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017, hlm 4

<sup>14</sup>Rachmawati Kusyadah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Andi, 2008), h. 124

memberikan penilaian yang baik terhadap karyawan yang kelihatannya penurut dibandingkan karyawan yang suka membantah, meskipun karyawan tersebut mempunyai prestasi yang bagus.

## **2. Halo effect**

Penilaian manajer terhadap prestasi karyawan secara keseluruhan hanya bergantung pada satu atau beberapa aspek saja. Efek tersebut merupakan efek berantai. Biasanya hal ini terjadi karena pimpinan melibatkan emosi dalam sebuah penilaian, menilai terlalu lunak atau keras, melibatkan prasangka pribadi, serta menilaiberdasarkan data atau fakta dari waktu yang paling akhir saja.

## **3. Perbedaan sifat manajer mempunyai sifat dan karakter yang berbeda.**

Penilaian karyawan bisa menjadi berbedaPenilaian karyawan bisa menjadi berbeda karena sifat manajer. Karena itu, disarankan untuk membuat standar/pedoman penilaian untuk dijadikan patokan penilaian agar penilaian secara adil dapat diwujudkan dan karyawan terhindar dari bias yang disebabkan karakter manjer.

## **4. Perbedaan stereotype tetentu**

Manajer dapat menjadi bias karena faktor etnis, jenis kelamin, atau golongan tertentu. Untuk menghindari hal itu, manjer harus berpegang pada pedoman/standar tertulis dan hasil penilaian prestasi pun harus dilakukan secara tertulis sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Keberhasilan dari sebuah kerja merupakan suatu sasaran yang ingin didapatkan oleh individu. Namun, proses untuk mendapatkan keberhasilan dari sebuah pekerjaan terdapat faktor yang bisa mempercepat atau memperlambat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Faktor yang mempengaruhi kinerja sangat penting untuk diketahui agar pencapaian dari suatu pekerjaan bisa didapatkan. Kinerja dari individu dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:<sup>15</sup>

1. Kualitas dan kemampuan individu, Yaitu merupakan hal yang berhubungan dengan pendidikan/pelatihan, etoskerja, motivasi kerja, dan kondisi fisik pegawai (individu). Kualitas dan kemampuan pegawai yang baik bisa didapatkan dari proses rekrutmen yang benar dan sesuai dengan standar penerimaan pegawai serta adanya pelatihan.
2. Sarana pendukung, yaitu hal yang berhubungan dengan sarana kerja dan lingkungan kerja. Dengan adanya sarana kerja dan lingkungan kerja yang baik akan membuat kinerja dari pegawai (individu) meningkat.

Dari pendapat ahli mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja individu di atas, peneliti memaknai bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja individu di atas, peneliti memaknai bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja merupakan faktor yang dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat bagaimana kinerja dari individu dalam bekerja dapat mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu untuk diperhatikan dalam pencapaian suatu pekerjaan.

---

<sup>15</sup> Simanjuntak, Payaman J, *Manajemen dan Evaluasi Kerja*, Jakarta:FE UI, 2005, hlm 11

### 3. *Penilaian Kinerja*

Menurut Rivai dan Basri, Penilaian kinerja merupakan kajian sistematis tentang kondisi kerja karyawan yang dilaksanakan secara formal yang dikaitkan dengan standar kinerja yang telah ditentukan oleh perusahaan.<sup>16</sup>

Dessler berpendapat bahwa penilaian kinerja adalah mengevaluasi dari seseorang karyawan baik saat ini maupun dimasa lalu dihubungkan dengan standar kinerja dari karyawan tersebut.<sup>17</sup> Penilaian prestasi adalah proses di mana organisasi menilai atau mengevaluasi prestasi kerja karyawan. Aktifitas ini dapat memberikan umpan balik dan koreksi terhadap pengambilan keputusan organisasi tentang pelaksanaan kerja mereka. Adapun manfaat evaluasi prestasi/ kinerja adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

#### 1. Meningkatkan prestasi karyawan

Dari hasil kerja atau pekerjaan karyawan, dapat diketahui masalah dan produktivitas mereka dalam bekerja. Dengan demikian, karyawan dapat memperbaiki atau meningkatkan prestasi setelah mengetahui hasil atau umpan balik dari adanya evaluasi tersebut.

#### 2. Standar kompensasi yang layak

Dari hasil evaluasi prestasi, manajer dapat mengetahui berapa upah atau kompensasi yang layak harus diberikan pada karyawan. Hal ini penting

---

<sup>16</sup>Rivai, Veithzal dan Ahmad Fawzi Mohd Basri, *Performance Appraisal*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 18

<sup>17</sup>Ismi Januari, Cindi, Juli 2015, *Penilaian Kinerja Terhadap Kepuasan Kerja dan Prestasi Kerja*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 24 No. 2

<sup>18</sup>Rachmawati Kusyadah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Andi, 2008), h.123-125



karena evaluasi prestasi dapat membantu dalam pengambilan keputusan manajer, apakah pemberian upah, bonus, insentif, dan bentuk kompensasi lain sudah layak dan adil bagi karyawan.

### 3. Penempatan karyawan

Pada periode tertentu, karyawan akan mengalami promosi, mutasi, transfer, dan emosi. Karena itu, sebelum keputusan ini diambil, manajer dapat melihat hasil prestasi karyawan dalam sebuah evaluasi yang sudah dilakukan sehingga dapat meminimalisasi risiko kesalahan dalam penempatan karyawan.

### 4. Pelatihan dan pengembangan

Hasil evaluasi dapat diketahui oleh manajer, dimana manajer melihat apakah program pelatihan dan pengembangan diperlukan atau tidak. Apabila hasil evaluasi menunjukkan banyak kekurangan atau hasil yang negatif maka sudah saatnya diperlukan program pelatihan dan pengembangan, baik untuk karyawan baru maupun karyawan senior. Namun, hasil yang baik ataupun positif hendaknya tidak membuat organisasi tidak berbesar hati dulu, karena pelatihan dan pengembangan selalu dibutuhkan untuk penyegaran bagi karyawan.

### 5. Jenjang karier

Dari hasil evaluasi prestasi, manajer dapat menyusun jalur karier karyawan sesuai dengan prestasi yang telah ditunjukkan karyawan.

#### 6. Penataan staf

Hasil prestasi yang baik atau buruk, mencerminkan bagaimana manajemen mengatur pembagian sumber daya manusia di dalam organisasi

#### 7. Minimnya data informasi

Informasi yang akurat sangat dibutuhkan organisasi untuk mengambil keputusan guna menempatkan karyawan, promosi, mutasi, transfer, demosi, kebutuhan program pelatihan dan pengembangan, jenjang karier karyawan, dan komponen-komponen lain dalam sistem informasi manajemen sumber data manusia. Informasi ini begitu pentingnya sehingga mampu mengurangi kesalahan pengambilan keputusan yang tidak tepat

#### 8. Kesalahan desain pekerjaan

Adanya indikasi hasil evaluasi prestasi yang buruk merupakan tanda adanya kesalahan dalam deskripsi desain pekerjaan yang tidak atau kurang cocok pada karyawan. Untuk itu manajer perlu memikirkan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

#### 9. Peluang kerja yang adil

Peluang kerja yang sama dan adil bagi karyawan bisa didapat apabila manajer melihat hasil evaluasi dan mempertimbangkan kesempatan pekerjaan yang layak dan menantang bagi karyawan yang menunjukkan prestasi bagus.

## 10. Tantangan eksternal

Penilaian prestasi juga tergantung dari faktor lain, seperti kepentingan pribadi, kondisi financial, kondisi kerja, keluarga, kesehatan karyawan, dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dimaknai bahwa penilaian kinerja adalah suatu evaluasi dari proses kerja dilaksanakan yang berkaitan dengan standar dari pekerjaan yang telah ditentukan. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan evaluasi agar bisa mengetahui seberapa besar pencapaian dari pekerjaan tersebut.

### **4. Tujuan Penilaian Kinerja**

Metode penilaian kinerja menjadi penting untuk diperhatikan, mengingat bagus tidaknya penilaian kinerja yang dipilih dan diimplementasikan. Penilaian kerja merupakan bagian dari fungsi manajemen yang sangat penting, suatu organisasi merancang program penilaian kinerja untuk memberikan informasi terkait pencapaian dari kinerja. Tujuan dari penilaian kinerja menurut Cummings dan Donald adalah:<sup>19</sup>

1. Untuk mencapa suatu kesimpulan yang evaluative atau yang member pertimbangan mengenai kinerja pegawai.
2. Untuk mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan.
3. Untuk pengembangan berbagai karya lewat program-program yang telah dilaksanakan.

---

<sup>19</sup>Sinambela, Poltak, Lijan, *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Impilikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm 61

Penilaian kinerja dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Sumber data untuk perencanaan ketenagakerjaan dan kegiatan pengembangan jangka panjang bagi perusahaan yang bersangkutan.
2. Nasihat yang perlu disampaikan kepada para tenaga kerja dalam perusahaan.
3. Alat untuk memberikan umpan balik (*feed back*) yang mendorong ke arah kemajuan dan kemungkinan memperbaiki atau meningkatkan kualitas kerja bagi para tenaga kerja.
4. Salah satu cara untuk menetapkan kinerja yang diharapkan dari seorang pemegang tugas dan pekerjaan.
5. Landasan/bahan informasi dalam pengambilan keputusan pada bidang ketenagakerjaan, baik promosi, mutasi, maupun kegiatan ketenagakerjaan lainnya.
6. Standar dalam penentuan tinggi rendahnya kompensasi serta administrasi bagi tenaga kerja.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dimaknai bahwa tujuan dari penilaian kinerja adalah sebagai landasan atau bahan informasi dalam pengambilan keputusan pada bidang ketenagakerjaan dan sebagai bahan pengembangan bagi instansi yang bersangkutan.

---

<sup>20</sup>Simanjuntak, Payaman J, *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta:FE UI. 2005, hlm 233

## 5. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur. Untuk menetapkan indikator kinerja, harus dapat diidentifikasi suatu bentuk pengukuran yang akan menilai hasil *outcome* yang diperoleh dari aktivitas yang dilaksanakan. Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja pegawai tersebut membuat kemajuan menuju tujuan dan sasaran dalam rencana strategis. Substansi mengenai indikator pengukuran kinerja terdiri atas aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan tugas dan yang dapat diukur meliputi:<sup>21</sup>

- a. Prestasi kerja (*achievement*), yaitu hasil kerja individu dalam menjalankan tugas baik secara kualitas maupun kuantitas kerja.
- b. Keahlian (*skill*), yaitu kemampuan teknis yang dimiliki oleh individu dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam bentuk kerja sama, komunikasi, inisiatif, dan lain-lain.
- c. Perilaku (*attitude*), yaitu sikap dan tingkah laku individu yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- d. Kepemimpinan (*Leadership*), ini menyangkut tentang kemampuan manajerial dan seni dalam member pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat termasuk pengambilan keputusan dan penentuan prioritas.

---

<sup>21</sup>Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Pegawai Negeri Sipil*, Bandung:Refika Aditama, 2007, hlm 15

Berdasarkan penjelasan mengenai indikator kinerja menurut Sedarmayanti, dapat dimaknai bahwa kinerja individu merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang yang sesuai dengan keahlian, perilaku dan kepemimpinan yang dimiliki oleh individu tersebut. Kinerja harus memberikan pelayanan public dengan tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Penulis memilih menggunakan indikator tentang pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Sedarmayanti karena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur kinerja dari Pendamping Lokal Desa dalam peningkatan pembangunan masyarakat.

## ***B. Konsep Pendamping Desa***

### ***1. Peraturan Tentang Pendamping Desa***

Peraturan tentang pendamping desa tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015, pendampingan desa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan tindakan pemberdayaan kepada masyarakat melalui asistensi, pengordinasian, pengarahan dan fasilitasi desa.<sup>22</sup> Pendampingan desa dilaksanakan oleh Pendamping Desa yang bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

---

<sup>22</sup>Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memdantkan bahwa pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memberdayakan masyarakat desa dengan:<sup>23</sup>

- a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi-teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa.
- b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarkat desa.

Pemberdayaan Masyarkat desa dilaksanakan antara lain dengan pendamping desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendamping dalam menjalankan program desa yaitu; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau evaluasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesioal, kader pemberdayaan masyarakat desa atau pihak ketiga.

---

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 ayat(1)

## ***2. Tugas Pendamping Desa***

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pada pasal 12, tugas dari Pendamping Desa yaitu:<sup>24</sup>

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai tenaga ahli, pendampingan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan agar pembangunan desa serta kemajuan desa dapat terwujud.
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa. Pendampingan desa sangat berpengaruh dalam pendampingan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang ada harus diorganisasi agar dapat berkembang dan dapat memajukan desa.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.

Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal penting untuk terwujudnya

---

<sup>24</sup>Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa dan Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Desa.



pembangunan desa yang partisipatif, oleh karena itu pendamping desa harus mampu untuk meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat.

6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Tidak hanya pendampingan kepada aparatur desa, pendampingan desa juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan yang berkawasan lingkungan. Karena pembangunan desa dapat terwujud jika dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh aparatur desa dan seluruh masyarakat.
7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sector agar pembangunan desa dapat terwujud dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan satu sector namun harus ada beberapa sector baik dari sector ekonomi maupun sector keamanan nasional.
9. Mengoptimalkan asset local desa secara amansipatoris. Aset local desa dalam penunjang pembangunan desa harus digunakan dengan optimal dan bijak. Oleh karena itu optimalisasi asset lokal desa oleh pendamping desa diperlukan untuk penunjang pembangunan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tugas Pendamping Desa dapat dimaknai bahwa, pendamping terhadap desa pada prinsipnya adalah upaya untuk menggerakkan potensi yang ada di desa sehingga desa mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk perubahan-perubahan

kearah lebih baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Karena itu pendampingan desa menjalankan aspek-aspek teknoratis dan administrative saja. Lebih dari itu, pendamping desa merupakan aktivitas mengubah nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar diterjemahkan dalam perilaku keseharian didesa. Dengan demikian pendamping desa yang dimaksud dapat berhubungan langsung secara intensif dengan pemerintah dan masyarakat desa, menjadi aktor yang strategis menuju implementasi UU Desa secara optimal.

Pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Misi besar pendamping desa adalah pemberdayaan masyarakat desa menjadi maju, kuat, mandiri dan demokratis. Kegiatan pendampingan membentang dari pembangunan kapasitas pemerintah, mengorganisasi dan membangun kesadaran kritis masyarakat.

Selain itu juga memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal hingga mengisi kekosongan antara pemerintah dan masyarakat. Intinya pendampingan desa adalah menciptakan suatu frekuensi yang sama antara pendamping dengan yang didampingi.

UU No.6 Tahun 2014 mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelolah desa secara nasional termasuk mengenai fungsi dan peran pendampingan desa. Dalam mendamping desa dan melakukan pemberdayaan masyarakat haruslah didampinging oleh pendamping desa yang dimana tenaga

pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dan mampu mendampingi pendamping lokal desa (PLD).

Pendamping desa tersebut harusnya dapat menjadi seorang pendamping desa yang memegang teguh tujuan utama yaitu memberdayakan masyarakat sesuai dengan bidang yang ditanganinya dan mampu berkomunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Artinya butuh ketekunan kesabaran dalam mendampingi desa. Misalnya pendamping desa harus mampu memberikan pengaruh kuat terhadap kemajuan suatu desa yang berada di Desa Dalaka Kec. Kab. Donggala.

Dengan hadirnya kebijakan penempatan pendamping desa sebagai amanat Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa maka hadirilah peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi No. 3 tahun 2015 tentang pendamping desa yang membahas mengenai pendamping desa termasuk di dalamnya mengenai pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus utama pendamping desa.<sup>25</sup> Oleh karena itu para pendamping desa harus mampu memahami apa yang menjadi tujuan dari pendampingan mereka dan harus memahami apa yang menjadi amanat dalam Undang Undang desa agar fungsi pendampingan dapat berjalan secara maksimal dan memenuhi target yang diharapkan pemerintah serta masyarakat.

## ***B. Konsep Pembangunan Desa***

### ***1. Pengertian Pembangunan desa***

Pembangunan masyarakat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, dimana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah

---

<sup>25</sup> Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 3 tahun 2015 tentang pendamping desa.

secara bersama.<sup>26</sup> Ada pula yang mengartikan bahwa pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.<sup>27</sup>

Dalam UU RI Nomor 22 Tahun 1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.<sup>28</sup> Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No.4 Tahun 2014 dikatakan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>29</sup> Pembangunan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia seutuhnya.<sup>30</sup> Selain itu untuk mencapai tujuannya pembangunan yang berpusat pada rakyat mengharuskan desentralisasi yang cukup besar dalam proses

---

<sup>26</sup>Rahardjo, Adasasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm 116.

<sup>27</sup>Rahardjo Adasasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm 3.

<sup>28</sup> Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 233

<sup>29</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>30</sup> Rosnawati, "Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kab. Way Kanan Dalam Perspektif Islam", (Skripsi Program Strata 1 IAIN, Lampung, 2015), h. 3

pembuatan keputusan.<sup>12</sup> Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sistem pembangunan prasarana desa harus berbuah dari cara yang selama ini dilakukan di desa. Dalam upaya pembangunan desa, peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari : (1) pendapatan asli daerah, (2) bagi hasil pajak dan hasil retribusi daerah kabupaten/kota, (3) dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, (4) bantuan keuangan dari pemerintah, (5) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan sumbangan lainnya yang dianggap sah.<sup>31</sup> mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Dana Alokasi Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat harus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datanya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Talcon Parsons mengemukakan Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian yang mempengaruhi kehidupan. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. <sup>32</sup>Indikator pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan

---

<sup>31</sup> Adiando dan dkk, "Strategi Pembangunan Desa Melalui Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Logas Tanah Daratan Kabupaten Kuantana Singingi", Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, (Vol 4, No 1, Januari-Juni 2013), h. 2-3.

<sup>32</sup> Edi suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Refika Aditama: Bandung, 2014), h. 58-59.

sosiolitik, dan kompetensi partisipatif.<sup>33</sup> Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat (masyarakat umum, masyarakat kurang mampu) dan unsur pemerintahan yang memang menggunakan kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran.

Pembangunan desa dengan pemberdayaan masyarakat langsung memiliki hasil yang lebih efektif dan efisiensi dibandingkan dengan pembangunan desa dengan menggunakan tenaga proyek ataupun pekerja dari desa lain pendekatan pemberdayaan masyarakat paling efektif dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat adalah merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan bekerja secara kooperatif dan menumbuhkan rasa gotong royong sesama warga desa.

Pelaksanaan program Pembangunan Berbasis Desa berperan sangat penting dan menentukan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi sumber daya yang ada, sehingga program pembangunan merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang di usulkan melalui Musrebandes dan menjadi prioritas pembangunan. Beberapa program tersebut meliputi: Pembangunan Saluran Irigasi untuk Pertanian, Pembangunan Plesengan, Pembangunan Masjid, Pembangunan Gedung Sekolah PAUD, Pembangunan Pipanisasi untuk Pemenuhan Air Bersih, serta Pembangunan Pengembangan Desa Wisata. Dalam program tersebut peran serta masyarakat untuk ikut menyaksikan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 63

program pembangunan berbasis masyarakat sangat tinggi, masyarakat dilibatkan dalam setiap proses pembangunan dari perencanaan dalam forum musyawarah masyarakat Tahlilan, Kelompok Tani, Karang Taruna serta forum PKK, pelaksanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat dilaksanakan secara antusias untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk tenaga, materi maupun pemikiran dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan berbasis masyarakat memperhatikan kebutuhan masyarakat yang merupakan realisasi dari aspirasi masyarakat yang disampaikan ketika Musrebangdes sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta program ini pula telah memanfaatkan potensi lokal yang ada, khususnya potensi sumber.<sup>34</sup>

## ***2. Tujuan Pembangunan Desa***

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan *pendapatan per kapita* suatu masyarakat terus-menerus bertambah dalam jangka panjang. Analisis tersebut menunjukkan bahwa data pendapatan perkapita bias digunakan untuk tiga tujuan sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Menentukan tingkat kesejahteraan yang dicapai seluruh Negara pada suatu tahun tertentu.
2. Menggambarkan tingkat kecepatan/kelajuan pembangunan ekonomi diberbagai Negara.
3. Menunjukkan jurang pembangunan diantara berbagai Negara.

---

<sup>34</sup>Sumbi, Kornelius dan Firdausi, Firman, 2016, *Pembangunan Berbasis Masyarakat Dalam Pembangunan Sumber Daya Masyarakat*, Vol. 5, No. 2

<sup>35</sup>Ase Satria, "Teori Pembangunan: Definisi Pembangunan Masyarakat Serta Tujuan Pembangunan yang Dilakukan Dalam Proses Pembangunan", diakses dari <http://www.maribelajar.id/Teori-pembangunan-definisi-pembangunan/>, pada tanggal 07 Desember 2019 Pukul 01.30

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2014 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.<sup>36</sup>

### **3. Strategi Pembangunan Desa**

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan Desa terdapat 4 jenis strategi:<sup>37</sup>

- a. Strategi Pembangunan (*growth strategy*).
- b. Strategi kesejahteraan (*welfare strategy*).
- c. Strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*responsive strategy*).
- d. Strategi terpadu atau strategi yang menyeluruh (*integrated or holistic strategy*).

Strategi adalah cara untuk mengerahkan tenaga, dana, daya, dan peralatan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Arti pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat

---

<sup>36</sup>Noor, Munawar, Juli 2011, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Civis, Vol. 1, No.2

<sup>37</sup>Mahendra, A, Januari 2015, *Pendekatan dan Strategi Pembangunan Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Ilmiah "RESEARCH SAINS", Vol. 1, No 1.



menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (*independent*) dan mandiri.

Hikmat menjelaskan ada beberapa faktor internal yang menghambat pemberdayaan antara lain, kurang bisa untuk saling mempercayai, kurang daya inovasi atau kreativitas, mudah pasrah atau menyerah atau putus asa, aspirasi dan cita-cita rendah, tidak mampu menunda menikmati hasil kerja, wawasan waktu yang sempit, familisme, sangat tergantung pada bantuan pemerintah, sangat terikat pada tempat kediamannya dan tidak mampu atau tidak bersedia menempatkan diri sebagai orang lain.<sup>38</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dari penelusuran kepustakaan, penulis belum menemukan hasil penelitian yang seperti tema penelitian ini, tapi penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir relevan dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian yang terdahulu yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi karya Ahmad Sulaiman, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung tahun 2018 yang berjudul “Kinerja Pendamping Desa Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Natar Lampung Selatan”<sup>39</sup> Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana Kinerja Pendamping Lokal

---

<sup>38</sup>Hidayanti, Puji, April 2008, Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Keterampilan Produktif PKBM Rawasari, Jakarta Timur, Perspektif Ilmu Pendidikan, Vol. 17, Th. IX

<sup>39</sup> Ahmad Sulaiman, *Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Natar Lampung Selatan*, Skripsi, (Lampung: Universitas Lampung, 2018).

Desa Dalam Pembangunan di beberapa Desa yang berada Di Kecamatan Natar yaitu Desa Rulung Raya dan Desa Pemanggilan.

2. Skripsi karya Maria Christina, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung tahun 2017 yang berjudul “Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”<sup>40</sup> Skripsi ini mengkaji tentang pentingnya menilai bagaimana sesungguhnya kinerja Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
3. Skripsi Karya Komaruddin, Jurusan Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 yang berjudul “Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus”<sup>41</sup> Skripsi ini mengkaji tentang kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa agar menjadi desa yang mandiri.

Sedangkan dari hasil penelitian yang didapatkan mengenai skripsi ini oleh peneliti bahwa skripsi ini mengkaji tentang bagaimana kinerja dari seorang pendamping lokal desa dalam melaksanakan serta mendampingi desa agar bisa mencapai pembangunan desa yang mandiri dan sejahtera.

---

<sup>40</sup>Maria Christina, *Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*, Skripsi, (Lampung: Universitas Lampung, 2017).

<sup>41</sup>Komaruddin, *Peran Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### ***A. Jenis Penelitian***

Dalam suatu penelitian seorang peneliti harus menggunakan jenis penelitian yang tepat. Hal ini dimaksud agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulisan. Metode yang dimaksud yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsini Arikunto “lebih tepat apabila menggunakan metode kualitatif.”<sup>42</sup>

Berdasarkan hal tersebut, menurut Bogdan dan Taylor seperti yang dimana dalam bukunya bahwa “ metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan”<sup>43</sup>.

Dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lebih jauh lagi penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang berupaya membangun

---

<sup>42</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet.9; Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 209

<sup>43</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm 31

pandangan orang-orang yang diteliti secara rinci serta dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik (menyeluruh dan mendalam) dan rumit.<sup>44</sup>

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini adalah:

1. Penyesuaian pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda
2. Bersifat langsung antara peneliti dan responden
3. Lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak perajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>45</sup>

Metode ini lebih mendekati kesesuaian dengan topik kajian proposal skripsi ini, yang menitik beratkan kepada kegiatan penelitian di lokasi objek dalam melakukan penelitian yang ada, dengan tujuan untuk memperoleh data ilmiah yang bersifat alamiah dan tidak menimbulkan hipotesis yang sifatnya menduga-duga berbagai hal yang menyangkut peran kinerja pendamping desa dalam peningkatan pembangunan desa Dalaka di Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala.

---

<sup>44</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Cet. 3; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 2.

<sup>45</sup> Arikunto, *Prosedur*, 3.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Penelitian ini berlokasi di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab.Donggala. Alasan penulis menjadikannya sebagai lokasi penelitian karena dari beberapa desa yang berada di kota Palu Sulawesi Tengah, penulis menganggap desa tersebut menjadi salah satu desa yang dapat dijadikan representasi sebagai desa yang memiliki kondisi yang produktif, serta yang stabil dan dinamis.

Kondisi inilah yang menjadi dasar pertimbangan sehingga penulis memilih lokasi penelitian, selain itu lokasinya sangat mudah dijangkau. Sehingga memudahkan bagi penulis untuk mengumpulkan data sesuai kebutuhan rencana penyusunan proposal. Penulis sangat berharap agar dapat memperoleh nilai tambah dalam melakukan penelitian ini dan sebagai langkah awal bentuk pengabdian dan aplikasi keilmuan selama melakukan studi.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dalam penelitian ini, kehadiran penulis sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran penulis di lokasi dalam usaha melakukan penelitian, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian bertindak selaku instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data, S. Margono mengemukakan bahwa kehadiran Penulis di lokasi selaku instrumen utama adalah sebagai berikut:

Manusia merupakan alat (instrumen) terutama mengumpulkan data. Penelitian kuantitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama mengumpul data. hal ini dimaksudkan agar lebih mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.<sup>46</sup>

Dalam melakukan penelitian, penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan *intens* segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas Interaksi sosial. Para informan yang diwawancarai (*interview*) akan diupayakan dapat memberikan informasi yang akurat dan valid.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Pada hakekatnya, data bagi seorang penulis adalah sebagai alat atau dasar utama dalam pembuatan keputusan atau pemecahan masalah. Oleh karena itu, data yang diambil harus benar-benar memenuhi kriteria yang dijadikan alat dalam mengambil keputusan. Kriteria data yang lebih sebagaimana yang dikemukakan oleh J. Supranto dalam buku metode riset aplikasinya dalam pemasaran adalah: “Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu (*up to date*) dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh (*comprehensive* ).<sup>47</sup>

Sedangkan sumber data menurut Suharsini Arikunto bahwa “sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh”. Pencatatan sumber

---

<sup>46</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. 2; Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm 3

<sup>47</sup> J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, Ed. 3; Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1981, hlm 2.

utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Manakah ketiga diantara yang dominan, jelas akan bervariasi dari satu waktu ke waktu lainnya dan satu situasi ke situasi lainnya.

Menurut Burhan Bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.”<sup>48</sup>

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.<sup>49</sup>

Dalam hal ini, untuk mengumpulkan data primer, peneliti menjadikan responden yaitu Pendamping Lokal Desa di Desa Kec. Sindue Kab. Donggala, Bapak Arifdal selaku Pendamping Lokal Desa sebagai sumber utama dalam mencari data-data yang diperlukan oleh peneliti.

Husen Umar mengemukakan pengertian data primer dengan menyatakan bahwa: “data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil penelitian kuesioner yang biasa dilakukan oleh pendidik”.

Data primer yaitu data diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber dan atau informasi yang dipilih. Adapun sumber

---

<sup>48</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Revisi, Cet. 12; Jakarta: 2002, hlm 107.

<sup>49</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2002) hlm 81

atau informasi penelitian ini adalah tenaga Pendamping Lokal Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala . Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang akan menjadi informan dipilih berdasarkan pada pemahaman dan pengetahuan mengenai kinerja dari pendamping Lokal Desa di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala dan faktor yang mempengaruhi Kinerja Pendamping Lokal Desa. Adapun kriteria yang dijadikan ketentuan pemilihan informan antara lain :

- a. Kepala Desa yang ada di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala (Selaku Mitra Kerja dari Pendamping Lokal Desa)
- b. Pendamping Lokal Desa di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala ( Unsur yang memiliki tugas melakukan pendampingan desa)
- c. Masyarakat yang berada di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala

#### 4. Data Sekunder

Data yang dihimpun selanjutnya adalah data sekunder, untuk lebih memperjelas pengertian data sekunder ini, Penulis kembali meneruskan kutipan dari Husen Umar, sebagai berikut:

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif Dan Kuantitatif* Cet, 1; Surabaya: Airlangga University press. 2001, hlm 129.



Data sekunder adalah data yang dihimpun dari dokumen resmi desa, misalnya laporan rapat, buletin resmi, buku peraturan dan tata tertib. Data jenis ini dihimpun melalui tehnik membaca dan studi dokumentasi, yang menunjukkan gambaran umum Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dan perpustakaan daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta buku-buku yang berhubungan dengan judul proposal ini.

#### ***E. Tehnik Pengumpulan Data***

Selanjutnya, untuk memperoleh data yang obyektif. Maka dalam penelitian penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data yang dianggap representatif dalam mendukung terselenggaranya penelitian antara lain :

##### **a. Interview**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam (*delph interview*). Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif. Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi, penggunaan teknik ini dengan alasan peneliti dapat menggali tidak saja pada apa yang diketahui dan dialami subjek, tetapi apa yang tersembunyi jauh

dalam diri subjek penelitian, dan apa yang dinyatakan kepada informan bisa hal-hal yang bersifat lintas waktu.<sup>51</sup>

Interview (wawancara) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual.<sup>52</sup>

Dengan demikian maka teknik interview merupakan teknik penulis dalam upaya memperoleh data melalui tanya jawab atau wawancara langsung antara penulis dan informan atas dasar pertanyaan yang telah dibuat dan langsung digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sudah disiapkan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapat informasi yang lengkap tentang kinerja pendamping desa terhadap pembangunan masyarakat di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam interview alat tulis menulis untuk transkrip wawancara dan alat perekam suara. Yang akan menjadi informan dalam wawancara ini adalah tenaga pendamping desa yang berada di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala.

---

<sup>51</sup> Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Cet. 4; Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 2.

<sup>52</sup>*Ibid*, 46.

#### b. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Cholid Narbuko bahwa observasi adalah “alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencari secara sistematis gejala-gejala yang di selediki.”<sup>53</sup>

#### c. Dokumentasi

Teknik lain yang dapat digunakan penulis selama mengadakan penelitian untuk memperoleh data dilapangan adalah menghimpun dokumen-dokumen di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala. Serta dalam teknik dokumentasi ini penulis juga menggunakan kamera sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar dilakukan dilokasi dimaksud.

### ***F. Tehnik Analisis Data***

Setelah jumlah data dan keterangan berhasil dikumpulkan penulis, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis beberapa data yang diperoleh dalam bentuk analisis deskriptif dengan menggunakan beberapa teknik analisis data antara lain :

---

<sup>53</sup> M. Djuanaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* Cet, 1; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, hlm 176-177.

### 1. Reduksi Data

Yaitu penulis merangkum beberapa data yang diperoleh di lapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang dianggap mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini, termasuk didalamnya data tabel tentang jumlah tenaga pendamping desa, penduduk, KK, dusun dan struktur desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala.

### 2. Penyajian Data

Yaitu setelah jumlah data dikumpulkan dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data yang tersedia. Selanjutnya adalah menyajikan kedalam inti pembahasan yang di jabarkan pada hasil penelitian dilapangan.

### 3. Verifikasi data

Yaitu sejumlah data dan keterangan yang masuk dalam pembahasan proposal skripsi ini akan diseleksi kebenaran dan validitasnya, sehingga data yang masuk dalam pembahasan ini adalah data otentik dan tidak diragukan keabsahannya.

## ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kuantitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis mengecek keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi data. Data yang diperoleh dicek kembali pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda, atau dicek dengan menggunakan

sumber yang berbeda. Misalnya apabila peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan , tenaga pendamping desa dengan peserta didik.<sup>54</sup>

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam

lokasi tempat diadakannya penelitian, yaitu di Desa penyusunan karya ilmiah ini.

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitasnya dan kredibilitasnya. Dalam hal ini penulis mengadakan peninjauan kembali, apakah fakta sebagai pengaruh dari seluruh data yang diperoleh memang benar-benar dan terjadi disuatu Dalaka Kec. Sindue Kab.Donggala.

#### ***H. Tahap-Tahap Penelitian***

Penelitian ini menggunakan tiga tahap penelitian yaitu : tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.<sup>55</sup>

##### **1. Tahap Pra Lapangan**

---

<sup>54</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. 6; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, hlm 216.

<sup>55</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet 9 ; Jakarta Rineka Cipta, 1993), hlm 245

Tahap persiapan yang terdiri dari penjajakan lapangan, mengurus izin penelitian, menyusun proposal, ujian proposal dan revisi proposal

## 2. Tahap Pekerjaan Lapangan atau Pelaksanaan

Pada tahap ini memahami fenomena yang terjadi dilapangan untuk direkam sebagai data penelitian terlibat langsung dalam penelitian karena ini adalah penelitian kualitatif sehingga peneliti sebagai pengumpul data langsung.

## 3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini membutuhkan ketekunan dalam obeservasi dan wawancara untuk mendapatkan data tentang berbagai hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian : pengecekan keabsahan, dan menggunakan tiga trigulasi sumber data, metode dan waktu.

## 4. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan dari sebuah peneliti data yang sudah diolah, disusun disimpulkan, diverifikasi, selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian Kemudian peneliti melakukan pengecekan, agar hasil peneliti mendapat kepercayaan dari informan dan benar-benar valid. Langkah terkahir yaitu penulisan laporan yang mengacu pada peraturan penulisan karya ilmiah yang berlaku di Fakultas ushuluddin, adab dan dakwah IAIN Palu.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Desa Dalaka***

##### **1. Sejarah Desa Dalaka**

Awal mula adanya masyarakat Kaili Unde atau berdirinya Desa Dalaka, karena terjadinya pebolai perkawinan antara Maradika Panimba Toposo (laki-laki) yang bernama Ginggi Lemba alias Pue Janggo dengan Mardika Loli (Perempuan) Bernama Pasisi. Dalam proses lamaran ini terjadi dialog. Pada dialog lamaran tersebut, maka jatuhlah tanah ini sebagai tanah Nipoadakah atau tanah mahar. Setelah itu akhirnya tanah ini dikenal dengan tanah Rapoadakah dalam bahasakaili Rai, dan muncullah nama Dalaka, sedangkan dalam bahasa Unde Dalaka atau daka itu adalah tanah adat.

Nama desa “Dalaka” sendiri berasal dari pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang dimana mereka bertemu dalam pertemuan adat untuk membicarakan proses lamaran, yang mana pada akhir pertemuan dijatuhkan tanah atau orang kaili sebut Nipoadakah atau Mahar<sup>56</sup>

##### **2. Etnis**

Mayoritas masyarakat Dalaka 90 persen beretnis kaili. Sisanya masyarakat pendatang yang bertempat di desa dalaka.

- 1.) Kaili : 459 KK
- 2.) Bugis/Makassar : 80 KK

---

<sup>56</sup>Hasim Ladado, Kepala Desa Dalaka, *Observasi*(10 Juli 2020)

### 3. Bahasa

Bahasa lokal dan dialek yang digunakan sehari-sehari di desa dalaka adalah Bahasa Kaili Unde karena sebagian besar warga desa berasal dari desa dalaka. Meski demikian, juga terdapat penggunaan bahasa Indonesia dari warga desa Dalaka.

### 4. Religi

Hampir dari seluruh warga desa Dalaka beragama islam, hanya sebagian beragama Kristen, katolik dan seterusnya yang tertera dibawah ini :

1.) Islama : 8. 210 Orang

2.) Kristen : 22 Orang

3.) Katolik : -

4.) Budha : -

5.) Hindu : -

6.) Kong Hu Cu : -

### 5. Letak dan Luas Wilayah

Desa Dalaka merupakan desa salah satu dari 15 desa di wilayah kecamatan Sindue Kabupaten Donggala.

### 6. Topografi Desa

Keadaan topografi tanah bervariasi dari daratan, perbukitan dan pegunungan. Ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 0- 500 meter.



## 7. Iklim Desa

Iklim desa Dalaka, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Dalaka Kecamatan Sindue.

## 8. Obsertasi Desa

Desa Dalaka merupakan desa yang dapat diakses menggunakan angkutan darat dengan jarak antara desa dengan Ibu Kota Kecamatan Sindue  $\pm 7$  km, jarak antara Desa Dalaka dengan ibu Kota Kab. Donggala  $\pm 86$  km dan jarak ke Ibu Kota Provinsi sekitar  $\pm 31$  km, dengan waktu tempuh antara 1,5 jam dan 2 jam dengan kendaraan roda empat dan umumnya kendaraan beroda dua.

**Tabel1.**  
**Orbitasi Desa Dalaka**

| NO | URAIAN  | KETERANGAN |
|----|---|------------|
| 1. | Jarak dari ibu kota kecamatan ke Desa Dalaka menggunakan kendaraan sepeda bermotor. | 7 km       |
|    | Lama jarak menempuh ke Desa Dalaka dari ibu kota kecamatan.                         | 15 menit   |
|    | Jika berjalan kaki atau non bermotor ke Desa Dalaka.                                | 1 jam      |
|    | Jarak desa dalaka ke ibu kota provinsi  |            |

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 2. | Sul-teng  | 65 km       |
|    | Lama jarak tempuh dari desa dalaka ke ibu kota provinsi | 9j 43 menit |

*Sumber Data: Google Maps*

Dari tabel diatas bahwa jarak tempuh dari kota kecamatan menuju desa dalaka menggunakan kendaraan sepeda motor ialah 7 km dan waktu jarak tempuh 15 menit dari desa dalaka menuju ibu kota kecamatan. Sedangkan jika berjalan kaki ke desa Dalaka waktu yang ditempuh sekitar 1 jam dan jarak desa dalaka ke ibu kota provinsi Sul-teng sekitar 65 Km serta jarak tempuhnya dari desa dalak menuju ibu kota provinsi ialah sekitar (9j 45 menit).

## **B. Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa Dalaka di Kec. Sindue Kab. Donggala**

### 1.) Pendamping Lokal Desa

Pendamping Lokal Desa adalah memfasilitasi dan mendampingi serta memantau berjalannya program dari desa serta mendampingi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakata desa dan pemberdayaan desa. Fasilitasi dapat dilakukan dengan cara-cara yang kreatif dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta seluruh aturan pelaksanaanya. Masyarakat desa di fasilitasi belajar untuk mampu mengelola kegiatan pembangunan secara

mandiri. Pengembangan kapasitas dikelola langsung oleh masyarakat sebagai bagian proses belajar sosial.

Pendamping Lokal Desa di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala yang ada di desa hanya 1 orang pendamping saja. Pendamping Lokal Desa di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala bertanggungjawab terhadap desa dampingan yang telah ditetapkan oleh pusat, masing-masing yang terdiri dari tiga sampai empat desa yang didampingi oleh tiap-tiap Pendamping Lokal Desa. Profil Pendamping Lokal Desa di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.**

**Profil/Biodata Pendamping Lokal Desa di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala**

| No. | Nama    | Pendidikan Terakhir | Pengalaman Kerja Dalam bidang sosial  | Lokasi Tugas  |
|-----|---------|---------------------|---|---|
| 1.  | Arifdal | SMA                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kader KPMD</li> <li>- Sekretaris Karangtaruna</li> <li>- Tim Penyusun RPJMDes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalaka</li> <li>- Lero Tatari</li> <li>- Masaingi</li> <li>- Ape Maliko</li> </ul> |

*Sumber Data: Wawancara PLD di Desa Dalaka*

Diatas merupakan tabel profil dari pendamping lokal desayang di tempatkan di desa dalaka yang mana jumlah dari PLD yang berada di desa Dalaka berjumlah 1 orang dan Nama dari PLD Dalaka ialah Arifdal yang bertempat tinggal di Masaingi, Pendidikan Terakhir Beliau Sekolah Menengah Atas (SMA),

pengalaman kerja dalam bidang sosial yang pernah beliau ikuti ialah menjadi salah satu kader KPMD, Sekretaris Karangtaruna dan Tim Penyusun RPJMDes. Lokasi yang didampingi oleh beliau sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) ada 4 lokasi ialah; Desa Dalaka, Desa Lero Tatari, Desa Masaingi, dan Desa Ape Maliko.

## 2. ) Program Kerja Yang Terlaksana dan tidak terlaksana

Dalam program kerja desa yang didampingi oleh Pendamping Lokal Desa ada beberapa program yang belum terselesaikan karna masalah anggaran serta beberapa masalah yang lain. Berikut ini penjelasan dari informasi yang penulis dapatkan dilapangan disusun berdasarkan unsur-unsur teori:

### a. Aksesibilitas

Dari hasil wawancara di lapangan penulis mendapatkan beberapa fakta terkait Program kerja yang ada didesa Dalaka yang pertama Aksesibilitas atau informasi mencari tahu apakah program kerja desa di desa Dalaka terlaksana semua atau hanya sebagian saja yang selesai, dalam hal ini dikatakan oleh kepala desa Dalaka yang bernama bapak Hasim Ladado, beliau mengatakan bahwa :

Program kerja yang ada di desa dalaka ini sebenarnya banyak dari fisik dan non fisik, cuman terkendala dari anggaran desa yang dimana anggaran desa ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat<sup>57</sup>

Dari hasil yang di dapatkan dalam wawancara tentang program kerja, beliau mengatakan bahwa program kerja yang ada di desa dalaka sangat banyak dari fisik hingga non fisik, akan tetapi masih belum terlaksana karna terkendala

---

<sup>57</sup>Hasim Ladado, Kepala Desa Dalaka, *Wawancara*(10 juli 2020)

oleh anggaran, yang mana anggaran dipakai untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di sana .

b. Keterliban Atau partisipasi

Dari hasil Observasi dan wawancara langsung dilapangan penulis menemukan bahwa yang terlibat dalam mendampingi program kerja ialah Pendamping lokal desa dalam terlaksananya kegiatan atau program tersebut yang diberikan oleh desa.

c. Akuntabilitas (Yang bertanggung Jawab)

Adapun yang bertanggung jawab atas program kerja desa dalam bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pembiayaan pemerintahan desa ialah Pendamping Lokal Desa maka setiap kali melakukan kegiatan program kerja desa harus membuat laporan pertanggung jawaban agar dapat di laporkan kembali setelah selesainya kegiatan tersebut.

Setelah dari Kepala Desa Dalaka, penulis menanyakan kepada Pendamping Lokal Desa yang di tempatkan di Desa Dalaka mengenai soal program kerja desa yang didampingi oleh beliau, dan beliau mengatakan :

Untuk program kerja yang saya damping sendiri lumayan banyak tidak bisa saya sebutkan satu-satu dan itu semua di masukan ke APBDes yang dimana terbagi dari empat bidang yaitu; bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan pembiayaan pemerintahan desa. Semua itu di biayai 2 mata anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) dan DDS (Dana Desa) dan masing-masing bidang tadi di

jabarkan lagi misalnya bidang pembangunan yaitu pembangunan jalan desa Pembuatan draenase dan lain-lain<sup>58</sup>

Penulis menemukan fakta yang menarik dari hasil wawancara bersama bapak Arifdal selaku pendamping Lokal Desa mengenai program kerja yang didampingi beliau yang dimana beliau mengatakan bahwa program kerja yang ia damping lumayan banyak tidak bisa sebut satu persatu dan program yang ia damping masuk APBDes yang dimana terbagi menjadi 4 bidang, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan pembiayaan pemerintahan desa. Yang mana semua bidang itu dibiayayai oleh 2 mata anggaran ADD dan DDS dan masing-masing semua itu djabarkan dalam tiap-tiap bidang.

**Tabel 3.**  
**Program Kerja Desa yang Terselamatkan dan Belum**

| No. | Program Kerja                  |  | Ket                  |                |
|-----|--------------------------------|--|----------------------|----------------|
|     | Fisik                          | Non Fisik  | Fisik                | Non Fisik      |
| 1.  | Membangun Monumen Kasur Bantal | BLT (Bantuan Langsung Tunai)                         | <b>Belum Selesai</b> | <b>Selesai</b> |
| 2.  | Perbaiki Jalan Raya            | Pengadaan Wastafel di tiap-tiap dusun di desa dalaka | <b>Selesai</b>       | <b>Selesai</b> |

<sup>58</sup>Arifdal, Pendamping Lokal Desa Dalaka, *Wawancara* (13 Juli 2020)

|    |  |                                     |         |         |
|----|--|-------------------------------------|---------|---------|
| 3. | Pembangunan Sekaligus penyelenggaraan Pos Kesehatan/polindes | Pengadaan APD (Alat Pelindung Diri) | Selesai | Selesai |
|----|--|-------------------------------------|---------|---------|

*Sumber Data : Wawancara PLD di Desa Dalaka*

Tabel diatas merupakan program kerja yang diberikan oleh Aparat desa kepada Pendamping Lokal Desa (PLD) untuk didampingi. Dala Tabel di atas terdapat 3 program (fisik) dan 3 program (Nonfisik) yang dimana masing-masing ada yang telah terlaksana dan ada juga yang belum terlaksana.

### **C. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pendamping Lokal Desa**

1. Kurangnya kerja sama antara Aparat Desa dan Pendamping Lokal Desa.
2. Kurangnya pemahaman dalam melaksanakan pendampingan Program.
3. Kurangnya Sinerji dari pihak desa dalam berkerjasama antara Aparat desa dan Pendamping Lokal Desa..

Penulis menemukan fakta di lapangan terkait faktor yang mempengaruhi kinerja dari Pendamping Lokal Desa yang dimana mengakibatkan tidak terlaksananya atau lambatnya berjalannya program kerja dari desa.

Adapun dalam wawancara bersama pak arifdal selaku Pendamping Lokal Desa, penulis memfokuskan pertanyaan terkait faktor yang mempengaruhi Kinerja Pendamping Lokal Desa yang dimana dalam hal melakukan atau

memantau sebuah program kerja ada beberapa kendala yang didapatkan, beliau mengatakan :

Kalau faktor atau kendala banyak, yang pertama dari kurangnya sinerjinya aparat desa yang mengakibatkan terlambatnya kegiatan di desa, dan banyaknya kritikan-kritikan dari masyarakat persoalan transparansi anggaran dari pemdes yang kedua sering terjadi gagal komunikasi antara aparat desa dengan Pendamping lokal Desa.<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara peneliti bersama bapak arifdal selaku Pendamping Lokal Desa di Desa Dalaka peneliti memahami bahwa ternyata adanya ketidak maksimalnya kinerja pedamping lokal desa dalam menjalankan atau mendampingi program dari desa ialah adanya kurang kerjasama antara PLD dan Aparat desa dalam melakukan kegiatan dari desa yang dimana malah terhambat.

Kemudian Penulis Mengarah kepada Salah satu Masyarakat yang ada di Desa Dalaka yang berinisial FA, Penulis menanyakan beberapa pertanyaan Persoalan yang mengenai tentang dilibatkan masyarkat desa dalam melakukan program dari desa atau tidak, beliau mengatakan :

Kalau disini, untuk program dari desa kami dilibatkan, begitu juga kalau ada acara di desa pasti semua masyarakat desa disini terlibat semua tidak ada yang tidak terlibat<sup>60</sup>

Wawancara diatas penulis menemukan sebuah fakta bahwa seluruh masyarakat yang ada didesa dalaka ikut serta dalam kegiatan desa baik program kerja maupun rapat bersama aparat desa mengenai program yang akan dilaksanakan.

---

<sup>59</sup> Arifdal, Pendamping Lokal Desa Dalaka, *Wawancara* (13 Juli 2020)

<sup>60</sup> Febrianto, Warga Desa Dalaka Dusun dua Desa Dalaka, *Wawancara* (14 Juli 2020)



Sementara pada sekretaris desa peneliti menemukan fakta lain lagi. Peneliti melakukan wawancara kepada sekretaris desa mengenai tentang faktor terkendalanya program kerja, beliau mengatakan :

Terkendalanya program kerja karena adanya kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman Pendamping Lokal Desa mengenai program kerja yang dia dampingi, kurangnya bertanya dan masih banyak lagi. Itulah kenapa banyak yang tidak terlaksana, karena kendala-kendala itu.<sup>61</sup>

Penulis menemukan hasil yang berbeda pada wawancara bersama bapak Sekretaris Desa bapak Suhardin Masauwa, beliau mengatakan bahwa terkendalanya suatu program karna adanya program kerja yang diberikan kepada Pendamping Lokal Desa sama sekali tidak di pahami karena itulah program kerja desa banyak tidak terlaksana kata bapak Suhardin Masauwa selaku Sekretaris Desa Dalaka.

Sementara pada Kasi Kesejahteraan peneliti menanyakan hal kinerja dari pendamping lokal desa dalam mendampingi sebuah program kerja yang diberikan, beliau mengatakan:

Untuk kinerja pendamping lokal desa sendiri, kinerjanya masih kurang efektif karna adanya kendala yang ia dapati pada saat di lapangan dalam mendampingi sebuah program kerja yang diberikan. Seperti jarak desa yang ia dampingi dan tempat tinggal si pendamping desa itu sendiri.<sup>62</sup>

Dalam Wawancara bersama bapak Kasi Kesejahteraan penulis menemukan bahwa kurangnya efektif dari kinerja pendamping lokal desa karna adanya sebuah kendala-kendala yang ia dapati dalam mendampingi sebuah

---

<sup>61</sup> Suhardin Masauwa, Sekretaris Desa Dalaka, *Wawancara* (15 September 2020)

<sup>62</sup> Nasrin S Pamu, Kasi Kesejahteraan Desa Dalaka, *Wawancara* (15 September 2020)

program kerja desa, yang dimana kendala-kendala tersebut ialah jarak lokasi pendampingan dan tempat tinggal.

Kemudian penulis menanyakan kepada bapak Kasi Kesejahteraan mengenai tentang apa-apa saja program kerja yang sudah terealisasi di desa Dalaka. Beliau menjawab:

Program kerja yang sudah terealisasi untuk tahun ini ialah penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa kepada masyarakat yang kurang mampu dan untuk program kerja lainnya masih sementara proses, karena masih menunggu anggaran dari desa. Selebihnya saya belum tahu menahu persoalan program kerja yang lainnya.<sup>63</sup>

Dari Wawancara diatas penulis mendapatkan sebuah informasi dari bapak Kasi Kesejahteraan bahwa dari program kerja yang terealisasi di tahun ini ialah penyaluran langsung tunai (BLT) dana desa yang dimana di berikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan menurut bapak Kasi Kesejahteraan desa Dalaka untuk program kerja lainnya masih sementara dalam perencanaan serta menurut bapak Kasi Kesejahteraan beliau masih belum tahu sama sekali mengenai persoalan program kerja yang lainnya.

Kemudian penulis ingin mewawancarai aparat desa yang lain mengenai program kerja yang tidak terlaksana, namun diarahkan lagi kepada Kepala desa beserta Sekretaris Desa. Penulis menemukan gambaran bahwa masih banyak Aparat desa yang tidak tahu sama sekali persoalan mengenai program kerja yang ada di desa Dalaka, serta hanya sebagian saja yang mengetahui permasalahan yang ada di Ruang lingkup Pemerintahan Desa.

---

<sup>63</sup> Nasrin S Pamu, Kasi Kesejahteraan Desa Dalaka, *Wawancara* (15 September 2020)

Namun terkait fakta di lapangan dari hasil pengamatan penulis menemukan sangat besar berkembangnya kemajuan dari desa dalaka yang dimana banyaknya pemberdayaan yang dilakukan oleh warga seperti salah satunya pembuatan bantal kapuk yang dimana pembuatan bantal kapuk ini akan di jual ke beberapa pasar yang ada di kota palu dan sekitarnya dan dibantu oleh desa juga sehingga sangat membantu dalam perekonomian masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa kinerja pendamping lokal dalam pembangunan desa belum semaksimal mungkin karena ada nya faktor internal yang ada pada pendamping desa itu sendiri maupun dari aparat desa. Karena agar mencapai kinerja yang semaksimal mungkin harus adanya kerjasama dan saling bersinerji antara pendamping lokal desa dan aparat desa dalam menangani masalah masyarakat dan masalah yang ada didesa. Karena pendamping lokal desa merupakan jembatan antara masyarakat dan aparat desa agar terjalin kerharmoinsan sosial.

Dengan demikian dengan adanya pendamping lokal desa di setiap desa bisa memberikan kinerja yang baik atau bisa membantu masyarakat dalam menghadapi masalah sosial karena itu tugas dari seorang fasilitator atau pendamping masyarakat.

#### **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan diatas, maka tidak berlebihan jika penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada aparat Desa Dalaka terkhususnya Kepala Desa Dalaka untuk terus dan sering melakukan komunikasi kepada Pendamping Lokal Desa dalam

mendampingi atau melaksanakan program dari desa agar terjalin kerharmonisan antara Pendamping Lokal Desa dan Aparat Desa.

2. Kepada Pendamping Lokal Desa yang ditempatkan di Desa Dalaka agar terus menjalin komunikasi dalam melaksanakan tugas sebagai pendamping lokal desa terhindar dari konflik disfungsional yang dapat menghambat kepada kinerja dari pendamping lokal desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar PrabuMangkunegara, *ManajemenSumberDayaManusia*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2009
- Arikunto,Suharsini, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet.9; Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 209
- Bungin,Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm 31
- Christina Maria, *KinerjaPendampingLokalDesadalamPeningkatan Pembangunan Desa di KecamatanKalirejoKabupaten Lampung Tengah*, Skripsi, Lampung: Universitas Lampung, 2017
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahannya: Juz 1-30*, Jakarta: PT. KumudasmoroGrafindo Semarang, 1994
- Dr.H.Bahrul, Kirom, *MengukurKinerjaPelayanandankepuasankonsumen*, Bandung:Pustakarekacipta, 2015
- Fauzan Almanshur M. dan Djuanaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*Cet, 1; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, hlm 176-177.
- Jamaludin, *SosiologiPerdesaan*, Bandung: PustakaSetia, 2015
- Komaruddin, *PeranPendampingDesadalamPemberdayaanMasyarakat di PekonPakuKecamatanKelumbayanKabupatenTanggamus*, Skripsi, Lampung: UIN RadenIntan, 2018
- Kessa,Wahyudin, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta: KementrianDesa, Pembangunan Daerah TertinggaldanTransmigrasiRepublik Indonesia, 2015,
- Kushandajani,  
*KewenanganDesadanPenyelenggaraanPemerintahanDesadalamPerspektif UU No. 6 Tahun 2014 TentangDesa*, DepartemenPolitikdanPemerintahan FISIP UniversitasDiponegoro, 2018
- Mangkunegara,AnwarPrabu,*ManajemenSumberDayaManusiaPerusahaan*,Bandu ng:PT. RemajaRosdakarya, 2017
- Modulpelatihanpratugaspendinglokaldesaimplementasiundang-undangnomor 6 tahun 2014 tentangdesa, Jakarta: KementrianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasiRepublik Indonesia, 2016
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. 2; Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm 3
- Supranto. J, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*,Ed. 3; Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1981, hlm 2.

Puji, Hidayanti, April 2008, Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Keterampilan Produktif PKBM Rawasari, Jakarta Timur, Perspektif Ilmu Pendidikan, Vol. 17, Th. IX

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Prawirosuntono, Suryadi, Kebijakan Kinerja Karyawan, Yogyakarta: BPFE, 2008

Sulaiman, Ahmad, *Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Natar Lampung Selatan*, Skripsi, (Lampung: Universitas Lampung, 2018).

Silahuddin, M, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015

Supranto. J, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, Ed. 3; Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1981, hlm

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Cet. 3; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 2.

Umar, Husen *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Cet. 4; Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 2

Yustika, Erani Ahmad, *Pengembangan Desa*, Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015

## DAFTAR INFORMAN

| NO. | NAMA             | JABATAN               | TANDA TANGAN |
|-----|------------------|-----------------------|--------------|
| 1.  | HASIM LADADO     | Kepala Desa           |              |
| 2.  | SUHARDIN MASAUWA | Sekretaris Desa       |              |
| 3.  | ARIFDAL          | Pendamping Lokal Desa |              |
| 4.  | NASRIN S PAMU    | Kasi Kesejahteraan    |              |
| 5.  | FEBRIANTO        | Masyarakat            |              |



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Daftar Pertanyaan Untuk Kepala Desa**

1. Bagaimana Awal Mula Berdirinya Desa Dalaka?
2. Apakah program dari desa terlaksanakan semua atau ada yang belum terlaksana?

### **B. Daftar Pertanyaan Untuk Pendamping Lokal Desa**

1. Berapa Jumlah Program Dari Desa yang didampingi?
2. Apa faktor penghambat dari pendamping lokal desa dalam menjalankan program dari desa?

### **C. Daftar Pertanyaan Untuk Sekretaris Desa Dalaka**

1. Apa Saja Faktor Terkendalanya Program Kerja?

### **D. Daftar Pertanyaan Untuk Masyarakat Desa Dalaka**

1. Apakah dalam kegiatan atau program yang dijalankan oleh Pendamping desa dan Aparat desa dilibatkan masyarakat desa atau tidak?

### **E. Daftar Pertanyaan Untuk Kasi Kesejahteraan Desa Dalaka**

1. Kinerja dari Pendamping Lokal Desa dalam Mendampingi Program Kerja Desa?
2. Apa-apa saja program kerja yang sudah terealisasikan di desa dalaka?

# TRANSKRIP WAWANCARA

## INFORMAN 1

Tanggal Wawancara: 10 Juli 2020

Wawancara Langsung

### Identitas Informan 1

Nama : HASIM LADADO

Jabatan : Kepala Desa Dalaka

Hasil Wawancara :

1. Bagaimana Awal Mula Berdirinya Desa Dalaka?

Jawab :

Nama desa “Dalaka” sendiri berasal dari pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang dimana mereka bertemu dalam pertemuan adat untuk membicarakan proses lamaran, yang mana pada akhir pertemuan dijatuhkan tanah atau orang kaili sebut Nipoadakah atau Mahar

2. Apakah program dari desa terlaksanakan semua atau ada yang belum terlaksana?

Jawab :

Program kerja yang ada di desa dalaka ini sebenarnya banyak dari fisik dan non fisik, cuman terkendala dari anggaran desa yang dimana anggaran desa ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat

# TRANSKRIP WAWANCARA

## INFORMAN 2

Tanggal Wawancara: 13 Juli 2020

Wawancara Langsung

### Identitas Informan 2

Nama : ARIFDAL

Jabatan : Pendamping Lokal Desa

Hasil Wawancara :

1. Berapa Jumlah Program Dari Desa yang didampingi?

Jawab :

Untuk program kerja yang saya damping sendiri lumayan banyak tidak bisa saya sebutkan satu-satu dan itu semua di masukan ke APBDes yang dimana terbagi dari empat bidang yaitu; bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan pembiayaan pemerintahan desa. Semua itu di biyai 2 mata anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) dan DDS (Dana Desa) dan masing-masing bidang tadi di jabarkan lagi misalnya bidang pembangunan yaitu pembangunan jalan desa Pembuatan draenase dan lain-lain

2. Apa faktor penghambat dari pendamping lokal desa dalam menjalankan program dari desa?

Jawab :

Kalau faktor banyak, dari kurangnya bersinerginya aparat desa yang mengakibatkan terlambatnya kegiatan di desa, dan banyaknya kritikan-kritikan dari masyarakat persoalan transparansi anggaran dari pemdes.

# **TRANSKRIP WAWANCARA**

## **INFORMAN 3**

Tanggal Wawancara: 14 Juli 2020

Wawancara Langsung

### **Identitas Informan 3**

Nama : Febrianto

Jabatan : Masyarakat

Hasil Wawancara :

1. Apakah dalam kegiatan atau program yang dijalankan oleh Pendamping desa dan Aparat desa dilibatkan masyarakat desa atau tidak?

Jawab :

Kalau disini leh, untuk kegiatan dari desa atau program dari desa kami orang dilibatkan dalam program dari desa, begitu juga kalau ada acara di desa pasti semua masyarakat desa disini terlibat semua

# **TRANSKRIP WAWANCARA**

## **INFORMAN 4**

Tanggal Wawancara: 15 September 2020

Wawancara Langsung

### **Identitas Informan 4**

Nama : SUHARDIN MASAUWA

Jabatan : Sekretaris Desa Dalaka

Hasil Wawancara :

1. Apa Saja Faktor Terkendalanya Program Kerja?

Jawab:

Terkendalanya program kerja karena adanya kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman Pendamping Lokal Desa mengenai program kerja yang dia dampingi, kurangnya bertanya dan masih banyak lagi. Itulah kenapa banyak yang tidak terlaksana, karena kendala-kendala itu

# TRANSKRIP WAWANCARA

## INFORMAN 5

Tanggal Wawancara: 15 September 2020

Wawancara Langsung

## Identitas Informan 4

Nama : NASRIN S PAMU

Jabatan : Kasi Kesejahteraan

Hasil Wawancara :

1. Kinerja dari Pendamping Lokal Desa dalam Mendampingi Program Kerja Desa?

Jawab:

Untuk kinerja pendamping lokal desa sendiri, kinerjanya masih kurang efektif karna adanya kendala yang ia dapati pada saat di lapangan dalam mendampingi sebuah program kerja yang diberikan. Seperti jarak desa yang ia dampingi dan tempat tinggal si pendamping desa itu sendiri.

2. Apa-apa saja program kerja yang sudah terealisasi di desa dalaka?

Jawab:

Program kerja yang sudah terealisasi untuk tahun ini ialah penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa kepada masyarakat yang kurang mampu dan untuk program kerja lainnya masih sementara proses, karna masih menunggu anggaran dari desa. Selebihnya saya belum tahu menahu persoalan program kerja yang lainnya.

NAMA-NAMA PEGAWAI KANTOR DESA DALAKA

| NAMA             | JABATAN                    |
|------------------|----------------------------|
| Hasim Ladado     | Kepala Desa                |
| Suhardin Masauwa | Sekretaris Desa            |
| Febrianto        | Kepala Urusan Tata Usaha   |
| Suardin          | Kepala Urusan Administrasi |
| Asmawinda        | Kepala Urusan Keuangan     |
| Umami Sar'an     | Kepala Seksi Pemerintahan  |
| Nasrin S Pamu    | Kepala Seksi Kesejahteraan |
| Pilu             | Kepala Seksi Pelayanan     |

Gambar 1.1. Pertemuan dalam Kegiatan Penyalurana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa



Gambar 1.2 Penyerahan (BLT) Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat Desa Ape Maliko





Gambar 1.3. Penyerahan (BLT) Bantuan Langsung Tunai di Desa Dalaka

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Afid, lahir di Moutong, Sulawesi Tengah, pada tanggal 18 Agustus 1999. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Delman dan Ibu Nono. Penulis memiliki 1 adik perempuan (Almh) dan 2 orang adik laki-laki, Rahma, Kagor, dan Huwal Balitau. Jenjang akademis penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan Madrasah Ibtidayah (MI) Al-Khairat Birobuli Utara pada tahun 2005, dilanjutkan Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al-Hidayah Palu pada tahun 2011 dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Palu pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu melalui jalur SPAN-PTKIN dan terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam pada tahun 2016, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Betaua Kec. Tojo Kab. Tojo Una-Una selama 30 hari.